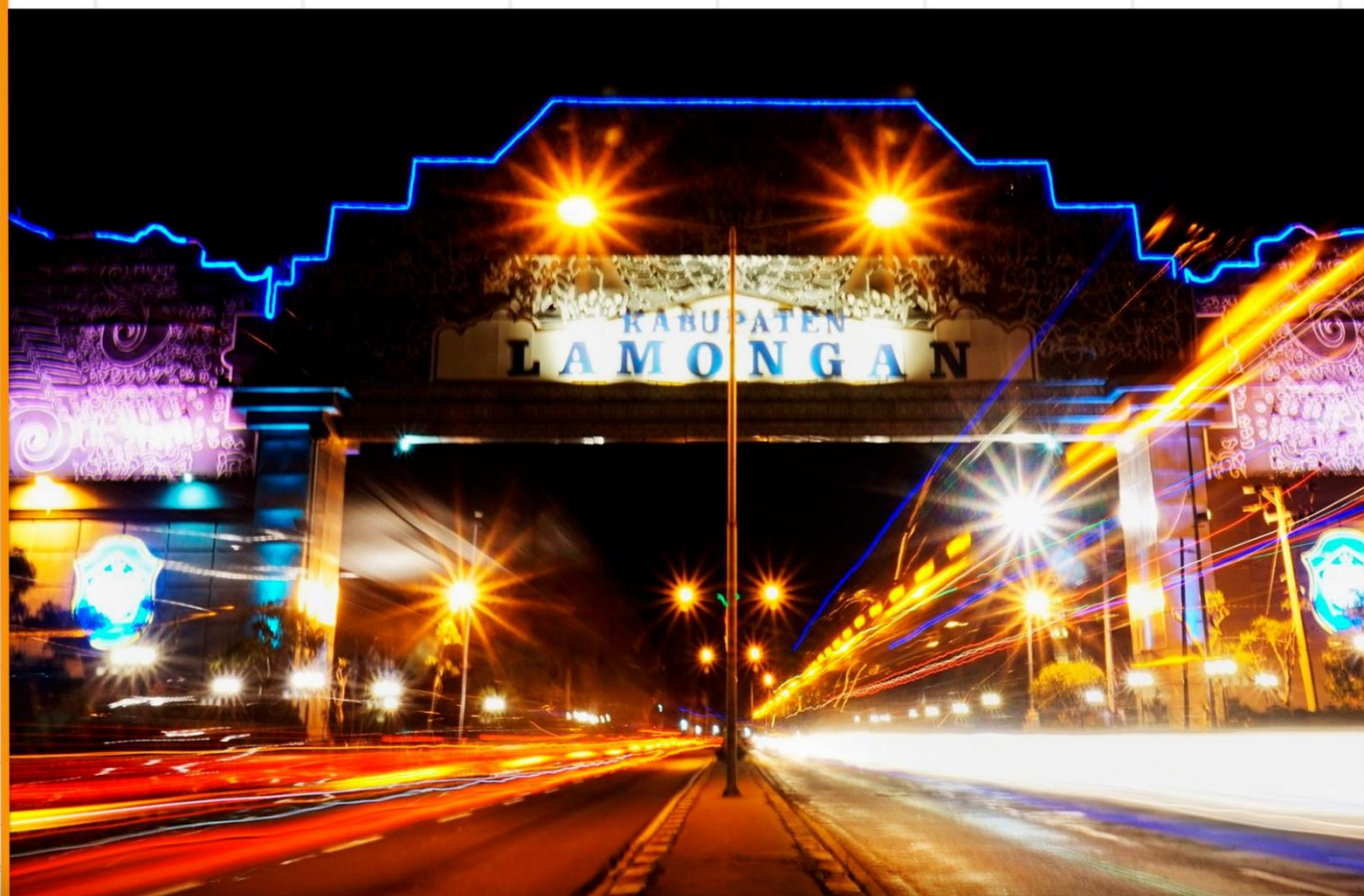




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Dalam LKJiP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024. Penyusunan LKJiP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*Good Governance*". Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan.

I.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dilaksanakan dengan mengacu pada semangat memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, serta berupaya meningkatkan pembangunan di perkotaan dan

perdesaan dalam rangka menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah maupun memelihara keseimbangan pembangunan dan penyebaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dinas sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan. Dengan mengakomodasikan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang mencakup bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang bersih, indah, nyaman dan sehat serta ketersediaan dana yang memadai, sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan profesionalisme dibidang tugasnya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Daerah Kabupaten Lamongan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan rakyat dan permukiman.

Disamping tugas dinas di atas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan standar pelayanan minimal (SPM) urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang serta 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian antara lain:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sedangkan 3 (tiga) Kepala Bidang yang secara teknis membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya masing-masing meliputi :

1. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Kepala Bidang Cipta Karya
3. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi.

Adapun masing-masing Kepala Bidang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi yang meliputi:

A. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- 1.) Kepala Seksi Perumahan,
- 2.) Kepala Seksi Kawasan Permukiman,
- 3.) Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas.

B. Kepala Bidang Cipta Karya:

- 1.) Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan,
- 2.) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman,
- 3.) Kepala Seksi Air Minum.

C. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi:

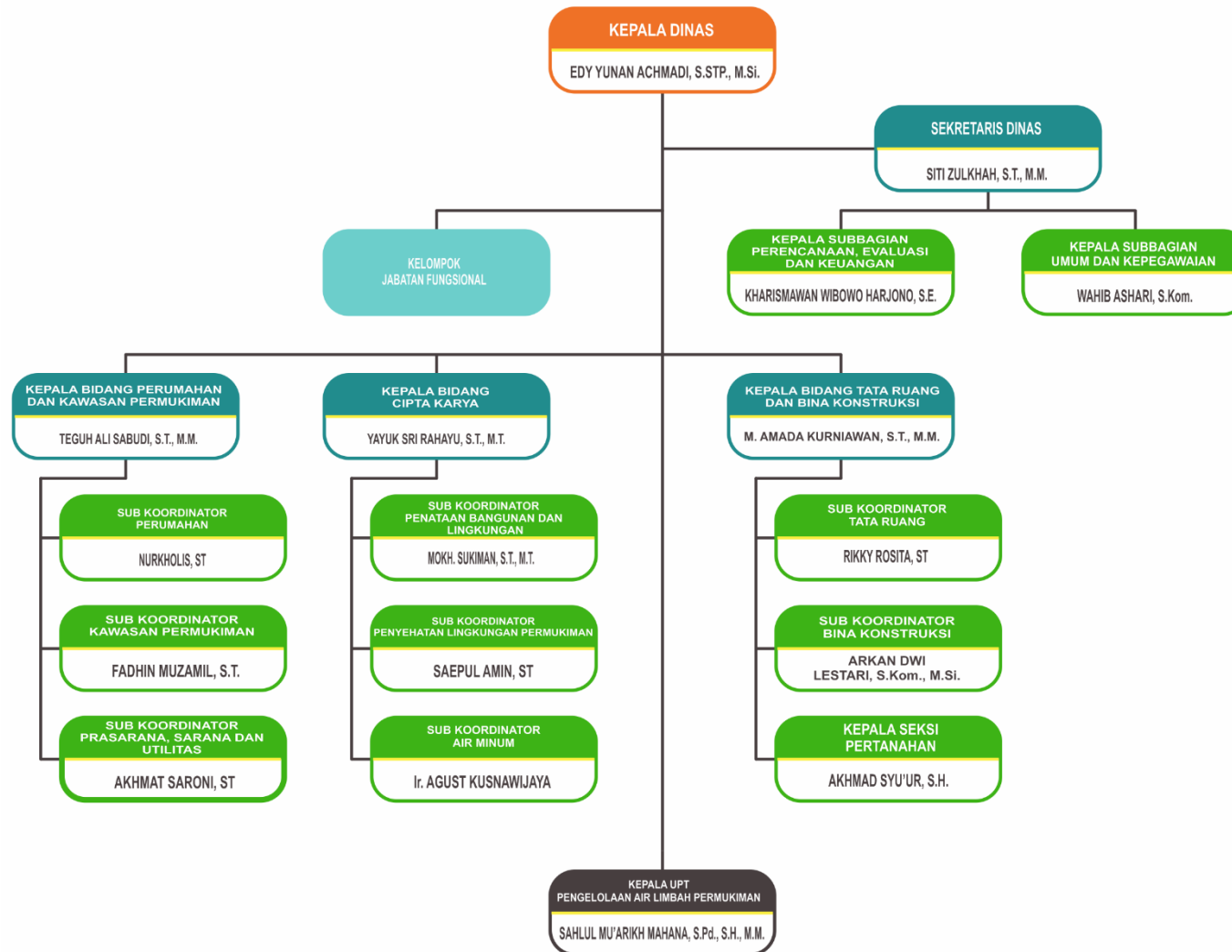
- 1.) Kepala Seksi Tata Ruang
- 2.) Kepala Seksi Bina Konstruksi.
- 3.) Kepala Seksi Pertanahan.

Dalam menjalankan tugas–tugas teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dibantu oleh 1 unsur pelaksana teknis Operasional dilapangan yang terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis IPLT Lamongan.

Untuk memperjelas gambaran Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 58 Th. 2020 dapat dilihat pada bagan berikut ini.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN



I.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam menentukan pembangunan nasional berupa penyediaan sarana dan prasarana dasar yang diarahkan untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun di pedesaan. Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, sehat dan terjangkau khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan Kenyamanan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja;
- c) Meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman.

Untuk mewujudkan tiga *strategic goal* di atas tugas pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya diwujudkan dengan dua pendekatan:

- a) Pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b) Pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

I.3.1 Personil

Personil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan seluruhnya berjumlah 89 personil terdiri 43 ASN, 3 Tenaga Kontrak Bupati dan 44 Tenaga Harian Lepas, dengan rincian sebagai berikut :

▪ Golongan I	=	0	Orang
▪ Golongan II	=	4	Orang
▪ Golongan III	=	35	Orang
▪ Golongan IV	=	4	Orang
Jumlah		43	Orang

Tenaga Kontrak yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Lamongan berjumlah 5 orang terdiri:

▪ Administrasi Kantor	=	3	Orang
-----------------------	---	---	-------

Sedangkan untuk tenaga harian lepas di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebanyak 48 orang.

▪ Staf / Administrasi Kantor	=	36	Orang
▪ Sopir	=	2	Orang
▪ Penjaga Kantor	=	2	Orang
▪ Petugas Kebersihan Kantor	=	4	Orang
Jumlah	=	44	Orang

Personil Dinas menurut tingkat pendidikan untuk menunjang tugas-tugas Dinas sampai tahun 2022 meliputi :

a. PNS

▪ Pasca sarjana (S-2)	=	9	Orang
▪ Sarjana (S-1)	=	27	Orang
▪ SLTA	=	7	Orang

b. Tenaga Kontrak Bupati

▪ Sarjana (S1)	=	2	Orang
▪ SLTA	=	1	Orang

c. Tenaga Harian Lepas

▪ S1	=	24	Orang
▪ D3	=	2	Orang
▪ SLTA	=	17	Orang
▪ SLTP	=	0	Orang
▪ SD	=	1	Orang

Untuk memperjelas jumlah jabatan struktural dan staff Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan pangkat dan pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel I-1 sebagai berikut

Tabel I-1
Jumlah Jabatan Struktural, Fungsi dan Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Menurut Pangkat dan Pendidikan

No	Jabatan Struktural	Jml	Jml Pangk. / Gol. Ruang	Jml	Pddk Formal	Jml	Ket
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S2	1	
2.	Sekretaris	1	Pembina Tk. I (IV/b)	1	S2	1	
3.	Kepala Sub. Bagian	2	Penata Tk. I (III/d)	2	S1	2	
4.	Kepala Bidang	3	Pembina (IV/a)	1	S2	1	
			Penata Tk. I (III/d)	1	S2	1	
			Penata (III/c)	1	S2	1	
5.	Kepala Seksi	5	Penata Tk. I (III/d)	1	S1	1	
6.	Kepala UPT	1	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	S1	1	
7.	JF Ahli Muda	4	Pembina (IV/a)	1	S2	1	
			Penata Tk.I (III/d)	3	S2	1	
					S1	2	
8.	JF Ahli Pertama	7	Penata Muda Tk. I (III/b)	5	S2	2	
					S1	3	
			Penata Muda (III/a)	2	S1	2	
			IX	10	S1	10	
9.	Pelaksana	13	Penata Tk.I (III/d)	1	S1	1	
			Penata (III/b)	5	S1	5	
			Penata Muda (III/a)	3	SMA	3	
			Pengatur Tk.I (II/d)	1	SMA	1	
			Pengatur (II/c)	3	SMA	3	

I.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tahun 2024 kendaraan operasional bagi pejabat struktural eselon III dan eselon IV yang digunakan untuk kegiatan perencanaan (Survey) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Adapun sarana dan prasarana dinas terdiri dari :

a. Sarana kendaraan bermotor

1. Kendaraan bermotor roda 4

Jumlah dan jenis kendaraan roda empat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel I-2
Jenis dan Jumlah Kendaraan Roda Empat
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Lamongan
Tahun 2024

Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
		Baik	Rusak
- Mobil Penumpang	6	6	-
- Mobil Barang	5	5	-

2. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3

Kendaraan bermotor roda 2 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 19 unit, kendaraan bermotor roda 3 sebanyak 6, semua dalam keadaan baik.

b. Sarana Perkantoran

Jumlah dan jenis sarana perkantoran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel I-3 dibawah ini.

Tabel I-3
Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Lamongan
Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	PC	35	Baik
2	Printer	26	Baik
3	AC	7	Baik
4	Notebook	10	Baik
5	Meja Kayu eselon IV	11	Baik
6	Meja Kayu eselon III	4	Baik
7	Meja Kayu eselon II	1	Baik
8	Proyektor	2	Baik
9	Layar Proyektor	2	Baik
10	Kursi rapat	94	Baik

I.3.3 Pembiayaan

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melalui 14 program dan 28 kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 108.886.201.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 92.309.175.999,00 atau 84,78% per 31 desember 2023, sedangkan sisa anggaran tersebut kembali ke kas daerah.

I.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJiP

Sistematika penulisan LKJiP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2022 disusun, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi :

1. Latar belakang,
2. Tugas pokok, fungsi dan Struktur Organisasi
3. Data umum organisasi

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini memaparkan tentang :

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kinerja Tahun 2022
3. Program dan Kegiatan
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi :

1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1.1 Pencapaian kinerja
 - 1.2 Perbandingan realisasi kinerja
 - 1.3 Perbandingan Realisasi kinerja s/d akhir periode RPJMD / Renstra
 - 1.4 Perbandingan Realisasi kinerja dengan realisasi nasional
 - 1.5 Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan
 - 1.6 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya
 - 1.7 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja
2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi :

1. Kesimpulan
2. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategik (RS)
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Lampiran lainnya (Penghargaan, inovasi dll)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. RENCANA STRATEGI

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang undang no. 25 tahun 2004. Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Visi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 10 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Lamongan 2021-2026, Visi Kabupaten Lamongan

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui 5 (lima) misi. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengemban misi 3 dalam RPJMD yaitu **Misi 3 “Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel. 1

RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021

Visi	Misi ke 3	Tujuan ke 3	Sasaran
Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan	Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

II.1.1 Tujuan

Dari sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan yang tersebut diatas maka ditetapkan tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah **“Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Permukiman yang Berkualitas dan Merata”**

II.1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan

Dimana pada tujuan tersebut mempunyai tiga Sasaran dan empat Indikator Kinerja, untuk lebih jelasnya Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Permukiman yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Permukiman
			Indeks Air Minum
			Indeks Limbah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
			Indeks Drainase
			Indeks IMB
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip DPRKPCK

II.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh staf, maka akan dijabarkan sebagai berikut :

Strategi dan Kebijakan :

Seperti diuraikan dalam subbab sebelumnya, dalam rangka pencapaian tujuan dalam pengembangan bidang Perumahan dan Permukiman diperlukan strategi dan kebijakan. Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebagai berikut :

Strategi :

1. Mensinergikan kegiatan OPD dengan Stakeholder lain dalam peningkatan rumah layak huni
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak
3. Mensosialisasikan Program rumah tangga sehat kepada khalayak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
4. Mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Lamongan
5. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang per kecamatan
6. Mengoptimalkan kenaikan jumlah tanah Pemkab yang bersertifikat

Arah / tindakan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendukung misi Kabupaten Lamongan adalah :

1. Perbaikan rumah tidak layak huni
2. Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunia
4. Pembangunan Sistem Drainase
5. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
6. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
7. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
8. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Secara singkat, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang lebih detail memuat program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran.

Tabel II-1
Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	78,29	81,05
		Indeks Air Minum	78,29	78,91
		Indeks Limbah	82,64	82,74
		Indeks Drainase	74,77	77,63
		Indeks IMB	80,91	83,66
		Indeks Permukiman	74,82	82,32
		Persentase Rumah yang terlayani SPAM	54,19%	55,71%
		Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	72,01%	72,42%
		Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	80%	73,33%
		Persentase drainase dalam kondisi baik	38,81%	51,33%
		Rasio Kepatuhan IMB	64,45%	76,43%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024	
			Target	Realisasi
		Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	5,90%	5,13%
		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	59,57%	79,86%
		Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	77,18%	77,45%
		Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%
		Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	100%	0%
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	12,25%	70,46%
		Persentase Rumah Layak Huni	70,60%	70,77%
		Persentase pemenuhan rumah korban bencana	70,97%	61,29%
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	61,51%	61,29%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	89,18	88,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,7	83,21

II.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Perumahan di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2024 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melalui 14 program dan 27 kegiatan. Adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Internal DPRKPCK	7.946.040.000	7.110.540.391
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi yang benar dan tepat waktu	65.500.000	65.126.250
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	5.689.876.000	4.988.829.889
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	231.279.000	229.043.702
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	40.000.000	39.400.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	1.669.885.000	1.539.947.359
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	249.500.000	248.193.191
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah yang terlayani SPAM	9.620.094.954	9.310.028.175
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang terlayani SPAM	9.620.094.954	9.310.028.175

No.	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	35.000.000	34.636.000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS-3R yang dibangun / dipelihara	35.000.000	34.636.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	2.373.451.000	2.339.285.500
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terbangun	2.373.451.000	2.339.285.500
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	3.120.924.000	2.929.140.480
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran drainase / Gorong-gorong perkotaan yang kondisi baik	3.120.924.000	2.929.140.480
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	11.720.857.380	9.421.698.977
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang terbangun, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diterbitkan	11.720.857.380	9.421.698.977

No.	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	7.677.118.000	767.930.487
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang tertangani	7.677.118.000	767.930.487
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	130.000.000	121.973.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	130.000.000	121.973.000
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	1.114.731.000	818.358.346
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah substansi rencana tata ruang yang disetujui	220.000.000	219.620.023
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah substansi rencana tata ruang yang disetujui	807.731.000	512.121.426
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi penataan ruang	87.000.000	86.616.897
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pemenuhan rumah korban bencana	729.841.000	728.759.200

No.	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana dan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah	55.000.000	55.000.000
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pokja / Satgas, Tim pendamping dan Fasilitator yang dibentuk dan terlatih	65.000.000	64.842.500
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang sudah terbangun atau diperbaiki	280.000.000	280.000.000
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dibina pengelolaannya	299.841.000	299.143.000
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan	30.000.000	29.773.700
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	1.488.405.000	1.484.868.511
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	103.000.000	102.678.000

No.	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	444.905.000	443.252.500
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	940.500.000	938.938.011
12	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	61.207.843.050	36.801.786.171
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	61.207.843.050	36.801.786.171
13	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	99.000.000	94.939.800
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	99.000.000	94.939.800
14	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	11.000.000	9.489.500

No.	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi penyelesaian ganti rugi sengketa tanah	11.000.000	9.489.500

II.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Kepala Dinas kepada Bidang atau seksi atau pelaksana yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Penetapan kinerja ini adalah amanah yang tertuang dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Penetapan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2023 ini hanya terkait dengan sasaran strategis saja atau **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, bukan keseluruhan Program / Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, karena tidak seluruh Program / Kegiatan bisa menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan dasar sarana dan prasarana yang tersedia. Berikut dapat dijabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Tahun Anggaran 2024. Tabel dibawah ini merupakan tabel pengukuran kinerja hanya berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama, untuk pengukuran kinerja keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dapat dilihat pada lampiran.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya guna meningkatkan kinerja organisasi.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Permukiman yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Permukiman
			Indeks Air Minum
			Indeks Limbah
			Indeks Drainase
			Indeks IMB
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip DPRKPCK

Adapun pencapaian kinerja setiap yang dikelompokkan berdasarkan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	78,29	81,05	103,53%
		Indeks Air Minum	78,29	78,91	100,79%
		Indeks Limbah	82,64	82,74	100,12%
		Indeks Drainase	74,77	77,63	103,83%
		Indeks IMB	80,91	83,66	103,40%
		Indeks Permukiman	74,82	82,32	110,03%
		Persentase Rumah yang terlayani SPAM	54,19%	55,71%	102,80%
		Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	72,01%	72,42%	100,57%
		Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	80%	73,33%	91,66%
		Persentase drainase dalam kondisi baik	38,81%	51,33%	132,26%
		Rasio Kepatuhan IMB	64,45%	76,43%	118,59%
		Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	5,90%	5,13%	86,95%
		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	59,57%	79,86%	134,06%
		Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	77,18%	77,45%	100,35%
		Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100,00%
		Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	100%	0%	0,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	12,25%	70,46%	575,18%
		Persentase Rumah Layak Huni	70,60%	70,77%	100,24%
		Persentase pemenuhan rumah korban bencana	70,97%	61,29%	86,36%
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	61,51%	61,29%	99,64%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	89,18	88,75	99,52%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,7	83,21	100,62%

II. Perbandingan Realisasi Kinerja

Sedangkan untuk perbandingan Prosentase capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, dapat disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
			2023	2024
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	103,60%	103,53%
		Indeks Air Minum	100,91%	100,79%
		Indeks Limbah	100,07%	100,12%
		Indeks Drainase	104,64%	103,83%
		Indeks IMB	102,76%	103,39%
		Indeks Permukiman	110,21%	110,03%
		Persentase Rumah yang terlayani SPAM	103,54%	102,80%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
			2023	2024
		Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	100,36%	100,57%
		Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	104,76%	91,67%
		Persentase drainase dalam kondisi baik	134,36%	132,25%
		Rasio Kepatuhan IMB	115,56%	118,60%
		Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	101,95%	87,01%
		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	145,93%	134,05%
		Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	100,32%	100,34%
		Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,00%	100,00%
		Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	100,00%	100,00%
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	732,03%	575,40%
		Persentase Rumah Layak Huni	100,32%	100,24%
		Persentase pemenuhan rumah korban bencana	76,47%	86,36%
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	102,88%	103,85%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
			2023	2024
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	99,13%	99,52%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100,56%	100,62%

III. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD / Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENSTRA (2021-2026)	REALISASI KINERJA(2021-2024)	CAPAIAN (2021-2024)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	79,09	81,05	103,53%
		Indeks Air Minum	78,87	78,91	100,05%
		Indeks Limbah	82,67	82,74	100,08%
		Indeks Drainase	76,31	77,63	103,83%
		Indeks IMB	81,90	83,66	102,15%
		Indeks Permukiman	75,73	82,32	108,70%
		Persentase Rumah yang terlayani SPAM	55,51%	55,71%	100,36%
		Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	72,10%	72,42%	100,44%
		Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	100,00%	73,33%	73,33%
		Persentase drainase dalam kondisi baik	45,54%	51,33%	112,71%
		Rasio Kepatuhan IMB	68,76%	76,43%	111,15%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENSTRA (2021-2026)	REALISASI KINERJA(2021-2024)	CAPAIAN (2021-2024)
1	2	3	4	5	6
		Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	7,63%	5,13%	67,23%
		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	79,86%	79,86%
		Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	77,30%	77,45%	100,19%
		Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	100%	100%	100%
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	18,37%	70,46%	383,56%
		Persentase Rumah Layak Huni	70,76%	70,77%	100,01%
		Persentase pemenuhan rumah korban bencana	100%	61,29%	61.29%
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas	62,46%	63,96%	102,40%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENSTRA (2021-2026)	REALISASI KINERJA(2021-2024)	CAPAIAN (2021-2024)
1	2	3	4	5	6
		Umum)			
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	89,19	88,75	99,52%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	82,96	100,56%

Berdasarkan data diatas realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami **Kenaikan**. Hal ini didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman

Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh :

1) Persentase Rumah yang terlayani SPAM

Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh :

- Program Pembangunan dan Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan Pedesaan sebanyak 851SR.

2) Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik

Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh :

- Pembangunan IPAL Komunal di 2 Lokasi, yakni di Ds. Pengangsalan Kec. Kalitengah dan Ds. Sidomukti Kec. Kembangbahu
- Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
- Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

3) Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia

Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini dikarena tahun 2024 tidak ada Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, hal ini didukung oleh :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

4) Persentase drainase dalam kondisi baik

Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh:

- a. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di 4 lokasi, yakni di Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Jetis, Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Sidoharjo, Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Tlogoanyar, dan Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Tumenggungan
 - b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
- 5) Rasio Kepatuhan IMB
Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh IMB/PBG sebanyak 165 Izin
- 6) Persentase Penataan bangunan dan lingkungan
Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan waktu pengadaan RTBL terkendala sehingga waktu pengerjaan tidak mencukupi
- 7) Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis sebanyak 111 orang.
- 8) Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang
Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Penambahan Luas lahan yang sesuai RTRW seluas 190,95 Ha.
- 9) Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Jumlah sengketa tanah Garapan yang ditangani sebanyak 5 sengketa.
- 10) Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan
Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan tahun 2024 tidak ada penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan
- 11) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
Realisasi kinerja tahun 2024 didukung oleh program-program yang dititikberatkan di lokasi kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor : 188/365/Kep/413.013/2020 tanggal 2 Nopember 2020, yaitu :
- a. Program Kawasan Permukiman sumber dana APBD
Program-program strategis yang pendanaannya berasal dari : APBD Provinsi, APBN dan Dana Desa
- 12) Persentase Rumah Layak Huni
Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, hal tersebut didukung oleh :

- a. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan sumber dana APBN, dengan hasil kegiatan memperbaiki 40 rumah.
- b. Program bedah rumah pendanaan dari APBD, dengan hasil kegiatan memperbaiki 11 rumah.

Sehingga peningkatan pada jumlah rumah layak huni yang tercapai sebanyak 51 rumah

13) Persentase pemenuhan rumah korban bencana

Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Jumlah rumah korban bencana yang tertangani sebanyak 18 rumah.

14) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

Realisasi kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Jumlah rumah yang terfasilitasi PSU Jalan sebanyak 4.596 rumah dan Jumlah rumah yang terfasilitasi PSU Drainase Lingkungan sebanyak 1.725 rumah.

IV. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan bertanggung jawab atas 2 SPM yaitu Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat. Berikut perbandingan antara target nasional dengan realisasi yang telah dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tahun 2024 :

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target Nasional 2024	Realisasi Kinerja 2024
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100 %	100 %
3	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat	100%	100%

	masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
--	--	--	--	--

Dari 4 indikator SPM tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari bisa tercapai 100% dari target yang ditetapkan karena ditunjang dari rumah tangga pengguna air bersih melalui jaringan perpipaan yang disediakan PDAM, HIPPAMS, PJT dan Pamsimas dan non perpipaan yang diusahakan sendiri oleh masyarakat melalui sumber air Sumur Bor/Perpipaan, Sumur Tak Terlindung, Mata Air Tak Terlindungi, Air Permukaan dan Air Hujan.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah bisa tercapai 100% dari target yang ditetapkan, karena ditunjang oleh 1 IPLT, 2 IPAL serta Sub Sistem Pengolahan Setempat yang diusahakan sendiri oleh masyarakat.
3. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota untuk tahun 2024 sebanyak 18 rumah.
4. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk tahun 2024 belum ada kegiatan relokasi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah daerah.

V. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan

Analisis kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebuah proses penilaian secara sistematis dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi ke 3 RPJMD.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2024 beberapa Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya, maka tidak semua sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tahun 2016-2021 dapat dilaksanakan.

Analisis kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman dengan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan; Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa; dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
 - 2) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan.
 - 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD); Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat; dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
 - 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan; Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase; Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan; Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; dan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan.
 - 5) Program Penataan Bangunan Gedung
Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota; Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota; dan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung

(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

- 6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya ; dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota.

- 7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis; Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi; dan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis.

- 8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota; Penyusunan Peta Dasar; Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota; Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.

- 9) Program Pengembangan Perumahan

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota; Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota ; Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana; Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana; Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun; Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

10) Program Kawasan Permukiman

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP; Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh; Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU; dan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh.

Serta didukung oleh kegiatan strategis yang berasal dari :

- a. Dana Alokasi Khusus
- b. Bedah Rumah dengan dana APBD
- c. Program Perumahan Terjangkau dari Kementerian PUPR (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan)
- d. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementarian PUPR
- e. Kegiatan penanganan kawasan kumuh dengan lokasi sesuai SK Bupati No. 188/356/Kep/413.013/2020 dengan pendanaan dari Kementerian PUPR

11) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian; Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

12) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah.

13) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Untuk mencapai sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan forum OPD sebagai sarana menjaring aspirasi masyarakat

- 2) Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja, serta penyusunan perencanaan program kegiatan
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran
- 4) Meningkatnya penatausahaan administrasi yang akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja
- 5) Meningkatnya komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah propinsi maupun pusat
- 6) Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor untuk operasional sehari-hari
- 7) Pemenuhan kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan untuk operasional sehari hari

VI. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Prosentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 107.274.305.384,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 71.298.065.438,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 33,54 %.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan yaitu proses perencanaan dan pengawasan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai tenaga survei dan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan kegiatan strategis di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

VII. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 14 program, 27 kegiatan, dan 69 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini.

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.620.094.954,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 9.310.028.175,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,78%. Hasil yang dicapai :

- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 - 3) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
 - 4) Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa
 - 5) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 34.636.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,96 %. Hasil yang dicapai :

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.373.451.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.339.285.500,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,56 %. Hasil yang dicapai :

- 1) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
 - 2) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 - 3) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
 - 4) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.120.924.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.929.140.480,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,85 %. Hasil yang dicapai :

- 1) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
- 2) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
- 3) Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
- 4) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

5) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

5. Program Penataan Bangunan Gedung

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.720.857.380,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 9.421.698.977,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 80,38 %. Hasil yang dicapai :

- 1) Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
- 2) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.677.118.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 767.930.487,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 10%. Hasil yang dicapai :

- 1) Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
- 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota

7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 121.973.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,82 %. Hasil yang dicapai :

- 1) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
- 2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
- 3) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.114.731.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 818.358.346,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 73,41%. Hasil yang dicapai :

- 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota
- 3) Penyusunan Peta Dasar
- 4) Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
- 5) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 6) Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.946.040.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 7.110.540.391,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 89,48%. Hasil yang dicapai :

- 1) Penyelenggaraan forum OPD sebagai sarana menjaring aspirasi masyarakat
- 2) Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja, serta penyusunan perencanaan program kegiatan tahun 2024 dan tahun 2023
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran,
- 4) Meningkatnya penatausahaan administrasi yang akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja
- 5) Meningkatnya komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah propinsi maupun pusat
- 6) Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor untuk operasional sehari-hari
- 7) Pemenuhan kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan untuk operasional sehari hari

10. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 729.841.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 728.759.200,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,85 %. Hasil yang dicapai :

- 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 2) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
- 5) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
- 6) Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
- 7) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

- 8) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

11. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.488.405.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.484.868.511,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,76%. Hasil yang dicapai :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- 2) Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
- 3) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
- 4) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- 5) Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
- 6) Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

12. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 61.207.843.050,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 36.801.786.171,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 60,12 %. Hasil yang dicapai :

- 1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- 3) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

13. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 99.000.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 94.939.800,00 dengan realisasi program sebesar 100% dan realisasi keuangan 95,90%. Hasil yang dicapai :

- 1) Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah

14. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan suntunan Tanah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.000.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 9.489.500,00 dengan realisasi program sebesar 100% dan realisasi keuangan 86,26%. Hasil yang dicapai :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas rutin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Lamongan yang bersumber pada APBD. Program Kegiatan Tahun 2023 yang telah di anggarkan dapat dilihat pencapaian sasaran pada uraian dibawah ini.

I. Akuntabilitas Keuangan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 9.620.094.954.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 4 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.310.028.175.00, atau 96,78% dari pagu anggaran

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 35.000.000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 1 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.636.000.00 atau 98,96% dari pagu anggaran

Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 2.373.451.000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 4 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.339.285.500.00 atau 98,56% dari pagu anggaran

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 3.120.924.000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 5 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.929.140.480.00 atau 93,85% dari pagu anggaran.

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 11.720.857.380.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 3 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.421.698.977.00, atau 80,38% dari pagu anggaran.

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 7.677.118.000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 2 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp767.9360.487.00, atau 10% dari pagu anggaran.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 130.000.000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 3 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 121.973.000.00, atau 93,83% dari pagu anggaran.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 1.114.731.000.00 dipergunakan untuk 3 kegiatan 6 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 818.358.346.00 atau 73,41% dari pagu anggaran.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai alokasi dana sebesar Rp 7.946.040.000.00 dipergunakan untuk 7 kegiatan 23 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.110.540.391.00, atau 89,49% dari pagu anggaran.

Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 55.000.000.00 dipergunakan untuk 5 kegiatan 8 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.000.000.00, atau 100% dari pagu anggaran.

Program Kawasan Permukiman

Program Kawasan Permukiman mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 1.488.405.000.00 dipergunakan untuk 3 kegiatan 6 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.484.868.511.00, atau 99,76% dari pagu anggaran.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 61.207.843.050.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 3 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.801.786.171.00, atau 60,13% dari pagu anggaran.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 99.000.000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 2 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.939.800.00, atau 95,90% dari pagu anggaran.

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 11.000.000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 1 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.489.500.00, atau 86,27% dari pagu anggaran.

BAB IV PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab Lamongan Tahun 2024 diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Telah di sampaikan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dan telah dilakukan peningkatan kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2024.
- Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada tahun 2024 merupakan media akuntabilitas yang memberikan informasi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan
- Hasil pengukuran Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 termasuk kategori sangat baik.
- Telah dapat diketahui indikator keberhasilan dari prosentase capaian kinerja pada setiap sasaran.
- Telah dapat diketahui faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor-faktor penyebab kegagalan suatu kegiatan.
- Dapat dibuat bahan acuan untuk pengambilan keputusan serta kebijaksanaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan pada tahun berikutnya.

Pada akhir penulisan kami tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang disusun oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2024 masih memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan sumber daya manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya, yang mempengaruhi. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan organisasi dimasa-masa yang akan datang dan secara kesinambungan melalui peningkatan kinerja semua unsur organisasi yang mempengaruhi baik secara tim, individu, maupun institusi sebagai wadah organisasi.

IV.2 SARAN

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini diharapkan sebagai alat pemicu bagi seluruh pihak yang terlibat pada Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk lebih meningkatkan aktifitas dan kreatifitas sebagai seorang pegawai negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban visi dan misi organisasi untuk menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan suatu kewajiban Kepala Dinas dalam memimpin suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan faktor-faktor pendukungnya atau suatu tindakan/pernyataan kejadian pihak lain yang berkepentingan untuk menjelaskan hasil seluruh tindakan dalam jangka waktu tertentu. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.

Adapun saran dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral serta berbagai upaya untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat.
- Berhasil dan berlangsungnya suatu organisasi dengan baik, memerlukan dukungan data yang akurat, tepat waktu dan lengkap. Sistem pencatatan dan pelaporan yang sudah ada perlu lebih dimantapkan dan perlu dipikirkan pengembangan sistem pelaporan sesuai kebutuhan.
- Untuk meningkatkan keberhasilan program, cakupan dan kualitas pelayanan serta mengantisipasi segala dampak pembangunan perlu strategi dan inovasi baru dalam mengendalikan dan menghadapi masalah.
- Sumber daya manusia (tenaga) perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, serta disesuaikan dengan kemajuan IPTEK dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Lamongan, Februari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Kabupaten Lamongan




Drs. M. Fahrudin Ali Fikri, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710424 199101 1 001